



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2024 KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN MAMASA

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Jumat (13/06) – Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Frider Sinaga** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada Ketua DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman) serta Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Mamasa.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Sulbar menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD TA 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2024 pada Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa, BPK memberikan Opini “**Wajar Dengan Pengecualian**” (WDP).

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penyajian LKPD yang perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti antara lain (1) Terdapat kekurangan volume Belanja Modal atas 57 paket pekerjaan pada tiga SKPD Pemerintah Kabupaten Polman; dan (2) Perubahan penjabaran APBD TA 2024 dengan Peraturan Bupati Mamasa tidak sesuai ketentuan.

Walaupun belum mendapatkan opini tertinggi, Kepala BPK Sulbar mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Polman dan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, dan berharap hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan, serta mengingatkan agar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.